

INKLUSIVISME PENDIDIKAN ISLAM

(STUDI FENOMENOLOGI ATAS BUDAYA PESANTREN BAKTI LUHUR KABUPATEN MALANG)

Muhammad Tulus

Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

tulus@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia As a plural nation that has various nuances of pluralism which is manifested in ethnic groups with unique backgrounds of regional languages, traditions, customs, arts, culture, and religions respectively. So educational inclusiveness is important to be developed in every religious education institution, especially Islam, it must even be a priority goal that must be achieved. Pesantren has a very important role, apart from being a place to learn Islamic religious knowledge, it is also a place to foster mental and moral character. One of them is fostering the value of religious tolerance carried out by Kyai at the Bakti Luhur Islamic Boarding School, Malang Regency. The fostering of religious tolerance values is carried out because of the emergence of various conflicts in Indonesia that originate from problems between religious communities. For this reason, fostering the value of religious tolerance is carried out at the Bakti Luhur Islamic Boarding School with the aim of educating and fostering the mental and morals of the students to become individuals who have good morals and have a tolerant attitude towards differences in people's lives, especially religious differences. The establishment of the Bakti Luhur Islamic Boarding School since 2006 did not necessarily run smoothly, because there were several groups who did not agree with the pesantren system. Because it is considered too liberal, violates the teachings of Islam and even some people disbelieve in the business.

Key words: Inclusivism; Islamic education; Boarding school.

ABSTRAK

Indonesia Sebagai bangsa *plural* yang memiliki berbagai nuansa kemajemukan yang mewujud dalam kelompok-kelompok etnis dengan kekhasan latar belakang bahasa daerah, tradisi, adat istiadat, seni, budaya, dan agama masing-masing. Maka inklusifitas pendidikan penting untuk dikembangkan disetiap lembaga pendidikan agama terkhusus Islam, bahkan harus menjadi tujuan prioritas yang harus di capai. Pesantren memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai tempat untuk belajar ilmu agama Islam, juga sebagai tempat membina mental dan akhlak. Salah satunya adalah pembinaan nilai toleransi beragama yang dilaksanakan oleh Kyai di Pesantren Bakti Luhur Kabupaten Malang. Pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan karena munculnya berbagai konflik di Indonesia yang bersumber dari permasalahan antar umat beragama. Untuk itu pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan di Pondok Pesantren Bakti Luhur dengan tujuan untuk mendidik dan membina mental dan akhlak para santri agar menjadi pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki sikap toleran terhadap adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya perbedaan agama. Berdirinya pesantren Bakti Luhur sejak 2006 ini tidak serta merta berjalan mulus, sebab ada beberapa golongan yang kurang setuju dengan sistem pesantren tersebut. Sebab dianggap terlalu liberal, menyalahi ajaran Islam bahkan beberapa orang mengkafirkan usaha tersebut.

Kata Kunci: Inklusivisme; Pendidikan Islam; Pesantren.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa *plural* yang memiliki berbagai nuansa kemajemukan yang mewujud dalam kelompok-kelompok etnis dengan kekhasan latar belakang bahasa daerah, tradisi, adat istiadat, seni, budaya, dan agama masing-masing. Maka inklusifitas pendidikan penting untuk dikembangkan disetiap lembaga pendidikan agama terkhusus Islam, bahkan harus menjadi tujuan prioritas yang harus di capai. Hal ini karena dalam dinamika kehidupan, sikap Inklusif dan Plural merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan di era globalisasi dalam rangka untuk membangun sikap toleransi keberagaman dalam keberagamaan. Pluralisme dan inklusifisme adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua sisi tadi tak dapat dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang seharusnya saling menopang dan menguatkan.¹

Di kalangan umat Islam, berbagai organisasi, yayasan dan lembaga keagamaan telah banyak didirikan. Tujuannya adalah untuk merealisasikan doktrin-doktrin Islam melalui pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh lembaga pendidikan agama di kalangan umat Islam. Dengan kata lain, umat Islam berupaya membumikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan visi dan misi kekhilafahan yang disandang oleh panggilan sejarahnya. Misalnya, pesantren.

Pesantren memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai tempat untuk belajar ilmu agama Islam, juga sebagai tempat membina mental dan akhlak. Salah satunya adalah pembinaan nilai toleransi beragama yang dilaksanakan oleh Kyai di Pesantren Bakti Luhur Kabupaten Malang. Pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan karena munculnya berbagai konflik di Indonesia yang bersumber dari permasalahan antar umat beragama. Untuk itu pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan di Pondok Pesantren Bakti Luhur dengan tujuan untuk mendidik dan membina mental dan akhlak para santri agar menjadi pribadi yang berakhhlakul karimah dan memiliki sikap toleran terhadap adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya perbedaan agama.

Berdirinya pesantren Bakti Luhur sejak 2006 ini tidak serta merta berjalan mulus, sebab ada beberapa golongan yang kurang setuju dengan sistem pesantren tersebut. Sebab dianggap terlalu liberal, menyalahi ajaran Islam bahkan beberapa orang mengkafirkan usaha tersebut.

Padahal kalau melihat dari tujuan didirikannya pesantren multi agama yang memiliki santri dari berbagai macam agama, yaitu Islam, Budha, Kristen, Kong Hu Cu, Hindu dan beberapa Aliran Kepercayaan ini ingin menjalankan NKRI sebagai pemersatu bangsa, bukan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sikap inklusif yang dikembangkan di pesantren Bakti Luhur tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul "*Inklusivisme Pendidikan Islam: Studi Fenomenologi Atas Budaya Pesantren Bakti Luhur Kabupaten Malang*".

KAJIAN LITERATUR

Secara etimologi kata inklusif dan ekslusif merupakan bentuk kata jadian yang berasal dari bahasa Inggris “*inclusive*” dan “*exclusive*” yang masing-masing memiliki makna “termasuk didalamnya” dan “tidak termasuk didalamnya atau terpisah”.² Menurut Nurcholis Madjid, gagasan inklusif berangkat dari anggapan bahwa kebenaran dan keselamatan suatu agama menjadi monopoli agama tertentu. Sementara agama lain, diberlakukan bahkan ditetapkan standar lain yang sama sekali berbeda; “salah dan karenanya tersesat ditengah jalan”. Hal ini sudah masuk ke wilayah *state of mind* kita. Cara pandang suatu komunitas agama (*religious community*) terhadap agama lain, dengan menggunakan cara pandang agamanya sendiri tanpa

¹Ibid, hlm. 175.

²Silvita IS, *Kamus Populer* (Surabaya: Jaya Agung, 1989), hlm. 127.

menyisakan ruang toleransi untuk berempati, apalagi simpati;”bagaimana orang lain memandang agamanya sendiri”.³

Pada dasarnya sikap inklusi dalam pendidikan adalah sikap yang mampu mengadopsi semua kebutuhan anak tanpa terkecuali, baik karena latar belakang, gender, agama, etnik budaya, bahasa, kemampuan fisik dan intelektual.⁴ Oleh karena itu, teologi inklusif mempunyai arti terbuka atas realitas dari keragaman (perbedaan) yang harus mengaku dan dapat menempatkan diri kebenaran mutlaknya. Inklusif merupakan keterbukaan dengan bersikap toleransi atas keberagaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu mayarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya.⁵

Formulasi kebijakan pendidikan agama dalam suatu negara akan memengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam skala luas. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut akan memiliki derivasi dengan bidang-bidang lain dengan cakupan beragam. Implikasi dari kebijakan pendidikan agama tidak hanya berkaitan dengan pendidikan agama semata, tetapi juga memengaruhi bidang sosial, politik, budaya, bahkan juga bidang ekonomi.⁶

Secara teoritis, ada beragam bentuk politik kebijakan pendidikan agama yang dapat dipilih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Saerozi, pola atau tipe kebijakan pendidikan yang tepat untuk konteks masyarakat Indonesia yang pluralis-multikultural adalah pola konfensional.⁷ Dalam pola ini, negara memberi legitimasi pada pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan subjek didik pada agama masing-masing.

Fenomena sosial-budaya seperti wacana pluralis-multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Oleh karena itu, keragaman tersebut harus menjadi faktor yang seyoginya diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, dan pelaksanaan kurikulum.⁸

Kurikulum, menurut Ronald C. Doll, merupakan pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah bimbingan dan arahan sekolah.⁹ Dengan pengertian yang hamper sama, Mauritz Johnson mengartikan kurikulum sebagai *a structured series of intended learning outcome* (hal-hal yang tersusun yang diharapkan dicapai oleh anak didik).¹⁰ Adapun R.S. Zais membagi kerikulum menjadi dua: kurikulum dokumen (*document curriculum*) dan kurikulum fungsional (*functional curriculum*). Suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, tetapi juga harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di kelas.¹¹

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan, maka implementasi kurikulum diarahkan kepada pencapaian tujuan. Tujuan dan materi yang hendak dicapai dalam pendidikan

³Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Jakarta: Mizan, 1987), hlm. 70.

⁴Rof'ah DKK, *Inklusi Pada Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: PSLD UIN SUKA, 2010), hlm. XXV.

⁵Richard J. Mouw dan Sander Griffon, *Pluralism and Horizons* (Eerdmans Publishing company: 1993), hlm. 2.

⁶ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Arruzz Media., Cet. Ke III, 2011. Hal. 161.

⁷ *Ibid.*, hal. 163.

⁸ Lihat Hamid Hasan, *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Januari-November 2000.

⁹ Ronald C. Dolls, *Curriculum Improvement: Decision Making and Process*. Boston: Allyn&Bacon, In, 1974. Hlm. 22.

¹⁰ Mauritz Johnson, *Internationality in Education*, New York: Centre for Curriculum Research and services, 1997. Hlm. 130.

¹¹ R.S. Zais, *Curriculum Principles and Foundation*, New York: Harper and Row Publisher, 1976. Hlm. 7.

disusun dalam kurikulum. Oleh karena itu kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan, yakni sebagai pedoman guru dalam proses pembelajaran.¹²

Demi mewujudkan tujuan kurikulum tersebut, ada empat hal yang harus diperhatikan guru, yaitu: (1) posisi anak didik sebagai subjek dalam belajar; (2) cara belajar anak didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi anak didik adalah *entry behavior* kultur anak didik; (4) lingkungan budaya anak didik adalah sumber belajar.¹³

Dengan pendidikan pluralis-multikultural, diharapkan akan lahir kesadaran dan pemahaman secara luas yang diwujudkan dalam sikap toleran, bukan sikap yang kaku, eksklusif, dan menafikan eksistensi kelompok lain maupun yang berbeda, apa pun bentuk perbedaannya. Kurikulum adalah *core* dari pendidikan, dengan demikian menurut Andersen dan Cusher bahwa kurikulum pendidikan pluralis-multikultural adalah kurikulum pendidikan mengenai keragaman budaya.¹⁴

Dengan dasar pluralis-multikultural sebagai bentuk dari pendidikan yang inklusif maka pendekatan pluralis-multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga peserta didik dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan.

Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan pluralis-multikultural haruslah didasarkan pada prinsip: 1). Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat; 2) keragaman budaya, agama dan etnis menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses dan evaluasi; 3). Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik; dan 4). Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.¹⁵

Salah satu komponen dalam pendidikan adalah pembelajaran, karena ini adalah salah satu komponen penting dalam kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Oleh karenanya, untuk memperbaiki relatas masyarakat, perlu dimulai dari proses pembelajaran. Dimensi pluralis-multikultural bias dibentuk melalui proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara sesama manusia baik karena perbedaan etnis, budaya maupun agama, sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan kehidupan dalam masyarakat.¹⁶

Dalam konteks desain pembelajaran, ada beberapa aspek yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan. *Pertama*, istilah inklusivisme pendidikan Islam yang pluralis-multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normative yang menggambarkan isu-isu pendidikan berkaitan dengan masyarakat yang pluralis-multikultural. *Kedua*, konsep pendidikan pluralis-multikultural dapat diwujudkan dalam kurikulum, namun perlu dirumuskan strategi yang harus ditempuh, mata pelajaran yang harus ditempuh, dan metode penyampaiannya. *Ketiga*, perlu peta persoalan dan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pluralis-multikultural. *Keempat*, perlu melakukan studi komparasi terhadap negara-negara dengan persoalan pluralitas dan multikulturalitas yang kompleks. *Kelima*, konsep, model, dan strategi pengembangan pendidikan agama berwawasan pluralis-

¹² Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Op.Cit.*, Hal. 190.

¹³ S Hamid Hasan, *Op., Cit.*

¹⁴ R. Andersen dan K. Cusher, *Multicultural and Intercultural Studies*, dalam *Teaching Studies of Society Environment* (ed. C. Marsh), (Sydney: Prentice-Hall, 1994)

¹⁵ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Op., Cit.*, hlm. 198.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 205.

multikultural.¹⁷ Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis.¹⁸

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi:

- 1) Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;
- 2) Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan;
- 3) Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya;
- 4) Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.¹⁹

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan yang bertujuan untuk:

- 1) Membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat;

Memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diarahkan ke suatu penelitian lapangan (*field research*). Kirk dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkenaan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristirahatannya.²⁰ Dari sinilah kemudian terdapat pengamatan yang berujung pada suatu deskripsi dan analisis mengenai pesantren Bakti Luhur Kabupaten Malang.

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya masalah sosial. Titik tekannya adalah masalah inklusifitas keagamaan di perguruan tinggi negeri Islam dan umum, sehingga pendekatan sosiologis sangat cocok digunakan.

Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data:

1. Pengamatan (*observation*)

Melalui observasi, peneliti mengamati beberapa objek di lapangan. Peneliti disini lebih cenderung menggunakan penggabungan dari *overt* dan *convert observation*. Artinya, pada saat-saat tertentu peneliti melakukan observasi secara terang-terangan (*overt*) dan lain waktu menggunakan pengamatan secara samar (*covert*).

2. Wawancara

Melalui teknik kedua ini, peneliti dapat mengetahui hal-hal mendalam tentang bagaimana pendidik menginterpretasikan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stainback, sebagaimana diungkapkan kembali oleh Sugiyono, bahwa *interviewing provides the researches a means to gain a*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁸ Ronald C. Dolls, *Op.*, *Cit.*, hal. 42-43.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 51.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

*deeper understanding of how the participant interprets a situation or phenomenon that can be gained through observation alone.*²¹

3. Dokumentasi

Teknik ketiga ini dimanfaatkan sebagai usaha penguatan terhadap kedua metode sebelumnya.

Analisis data kualitatif pada dasarnya ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.²² Prosesnya sendiri dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan selama dilapangan. Sejak sebelum memasuki lapangan, peneliti menganalisa data hasil studi terdahulu, atau data skunder, yang digunakan untuk menentukan focus penelitian. Akan tetapi focus tersebut masih bersifat sementara, yang kemudian berkembang setelah peneliti masuk selama di lapangan.²³ Kegiatan analisinya dimulai dengan mengumpulkan data lapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL

Dalam KBBI, moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Adapun sikap moderat sendiri berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Sikap moderat juga bisa diartikan sebagai sifat yang berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dalam konteks keagamaan, moderasi beragama bisa diartikan dengan sikap spiritual dengan mempertimbangkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²⁴

Moderasi maupun sikap moderat merupakan sebuah sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sikap moderasi tentunya tidak hadir begitu saja dalam diri seseorang, melainkan harus dilatih dan dibina oleh lingkungan yang menaunginya. Salah satu cara yang tepat dalam membina sikap moderasi kepada seseorang adalah melalui pendidikan. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa karakter yang ada pada anak sejatinya sudah ada sejak lahir. Hal ini dapat diumpamakan dengan jiwa anak berupa kertas yang di dalamnya terdapat terdapat tulisan yang agak suram. Peran pendidikan disini adalah untuk menebalkan dan menerangkan tulisan-tulisan yang ada pada kertas tersebut.²⁵

Lingkungan pendidikan yang sangat dekat keberadaannya adalah keluarga. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwasanya yang dinamakan keluarga ialah kumpulan beberapa orang yang terikat karena sebuah keturunan yang mengerti dan merasa sebagai suatu gabungan yang hak dan berkehendak untuk memperteguh gabungan tersebut untuk kemuliaan satu-satunya dan semua anggota.²⁶ Keluarga merupakan tempat berlangsungnya pendidikan individu dan pendidikan sosial. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa keluarga

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 318.

²²*Ibid.*, hlm. 336.

²³*Ibid.*, hlm. 337.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring," 2016.

²⁵ Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa (Anggota IKAPI), 2011), 407.

²⁶ Dewantara, 380.

merupakan tempat terbaik dalam memberlangsungkan pendidikan sosial. Beliau melanjutkan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan paling sempurna dibandingkan dengan tempat yang lain perihal pembinaan kecerdasan budi pekerti (watak individual) dan persediaan kehidupan kemasyarakatan.²⁷

Keluarga merupakan alam pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Tahapan pendidikan pertama dalam keluarga yaitu pendidikan yang berasal dari orang tua. Peran orang tua dalam tahap ini adalah sebagai penuntun, pengajar, dan pemberi contoh. Tahapan kedua dalam pendidikan keluarga adalah saling mendidik antara anak yang satu dengan yang lainnya (bagi yang bukan anak tunggal). Tahapan berikutnya berupa anak mendidik diri mereka sendiri. Seorang anak pasti mengalami berbagai kejadian baik itu di dalam keluarga atau di masarakat di luar sana. Kejadian-kejadian yang dialami oleh sang anak inilah yang menimbulkan pendidikan diri itu sendiri.²⁸

Orang tua menjadi pemegang peran paling penting di dalam pendidikan keluarga ini. Seperti yang telah disebutkan, orang tua memiliki peran sebagai penuntun, pengajar, dan pemberi contoh. Sebagai penuntun dan pengajar, orang tua memiliki kedudukan yang berbeda dengan seorang guru. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua merupakan pendidikan pokok sedangkan guru berkewajiban untuk membantu mengembangkan pengetahuan yang telah di dapat oleh anak. Memberikan contoh kepada anak merupakan peran penting yang harus di jalankan oleh orang tua dalam pendidikan keluarga. Hal ini disebabkan anak cenderung meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Menjadikan atau memberlakukan hal-hal yang baik kepada seorang anak merupakan salah satu upaya orang tua dalam menjalankan perannya sebagai pemberi contoh dalam dunia pendidikan.²⁹

Usia 3,5 samapai 7 tahun merupakan “masa peka” bagi seorang anak. Usia ini merupakan usia dimana seorang anak merekam semua kesan yang dia terima dari luar jiwanya. Hal ini disebabkan pada usia 3,5 sampai 7 tahun, jiwa yang terdapat pada seorang anak masih bersifat sederhana yang artinya dapat berubah. Disinilah orang tua berperan penting dalam membentuk jiwa seorang anak termasuk sikap moderasi.³⁰

Pengenalan akan keberagaman kepada anak merupakan hal penting dalam menumbuhkan karakter moderasi terutama tentang keberagaman agama. Pengenalan tentang keberagaman agama kepada anak ini merupakan salah satu implementasi dari peran orang tua dalam pendidikan keluarga yakni peran orang tua sebagai penuntun dan pengajar. Tidak hanya mengenalkan keberagaman agama kepada anak, pembelajaran tentang sikap atau cara menghadapi keberagaman agama tersebut juga merupakan materi penting yang harus disampaikan kepada anak.³¹ Yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran mengenai sikap ini tidak hanya diajarkan melainkan juga harus dicontohkan oleh orang tua tersebut. Mengingat

²⁷ Dewantara, 374.

²⁸ Dewantara, 375.

²⁹ Dewantara, 375–76.

³⁰ Dewantara, 384.

³¹ Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” 330.

orang tua memiliki peran sebagai pemberi contoh dalam pendidikan keluarga. Salah satu sikap yang dapat dicontohkan dalam kasus ini adalah toleransi. Jauh sebelum mengenalkan tentang apa itu moderasi kepada anak, toleransi merupakan karakter penting yang harus diterapkan kepada anak sejak dini. Penanaman karakter ini sejak dini akan menjadikan sebuah kebiasaan kepada anak dengan harapan bisa menumbuhkan sikap moderasi dalam diri anak seiring dengan berjalaninya waktu. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yaitu:

“Anak-anak yang biasa turut mengerjakan segala *pekerjaan di alam keluarga*, dengan sendiri mengalami dan mempraktikkan macam-macam tenaga yang amat banyak faedahnya bagi *pendidikan budi-pekerjai* (giat, tahan, berani, cerdik, awas, sedar sejuk-hati, tenang-fikiran, berperasaan, esthetic, dsb.); bagi *pendidikan sosial* (hemat, benci pada laku atau barang atau keadaan mubadzir, memelihara orang sakit, memberi pertolongan pada umumnya, membersihkan segala keadaan yang kotor, menertibkan laku dan keadaan, hidup damai, menghasilkan segala laku, barang dan keadaan, dan sebagainya).”³²

Praktik pengajaran agama dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu upaya terwujudnya moderasi beragama oleh bapak pendidikan indonesia, Ki Hajar Dewantara. Perbincangan mengenai diterapkannya mata pelajaran agama dalam pendidikan sebenarnya telah ramai beberapa waktu dekade terakhir ini. Hal demikian telah dikaji menjadi poin – poin penting oleh Ki Hajar Dewantara, beliau mengungkapkan bahwasanya mayoritas masyarakat indonesia berjiwa religius. Sejak dulu masyarakat terbuka dan menerima dengan baik ajaran agama itu sendiri sehingga secara tidak langsung nilai – nilai agama melebur bahkan dapat mengikuti hukum ataupun aturan – aturan dalam beragama dengan baik. Namun permasalahan muncul ketika terdapat tuntutan dimana sifat keagamaan ini diwujudkan dalam bentuk “pengajaran agama” sebagaimana syariat agama yang sudah pasti.³³

Setiap golongan agama tentu memiliki tuntutannya masing – masing sesuai dengan ajaran dan organisasi agama yang menaunginya. Menerima tuntutan masing – masing agama dalam upaya perwujudan “pengajaran agama” menjadi sebuah keharusan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Pemerataan yang demikian menjadi salah satu tolak ukur bagaimana moderasi agama berjalan dengan baik di negara ini.³⁴ Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dalam dunia pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh tiap – tiap individu, setidaknya hal demikian yang diinginkan oleh bapak pendidikan negara ini. Akan tetapi tidak semua ide dan gagasan akan berjalan seperti apa yang dicita citakan beliau, kenyataan di lapangan berbanding terbalik ketika agama Islam dengan persentase pemeluk agama yang lebih tinggi dibanding agama lainnya mengajukan tuntutan yang lebih besar.

³² Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, 377–78.

³³ Dewantara, 188.

³⁴ Dewantara, 189.

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kesempatan yang sama rata pada setiap agama untuk mengajukan tuntutan, akan tetapi seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dalam teknik pelaksanaannya masih belum bisa memberikan rasa puas dan adil untuk semua golongan agama. Terdapat golongan yang tidak mufakat apabila pelajaran agama dimasukkan dalam daftar pelajaran wajib untuk peserta didik, di sisi lain ada yang menyepakati hal ini namun dengan berbagai syarat, diantaranya adalah pelajaran agama seharusnya ditempatkan diluar jam pelajaran lembaga pendidikan.³⁵ Selain itu juga muncul tuntutan agar jumlah alokasi waktu pelajaran agama ditambah, dan tuntutan akan penambahan mata pelajaran bahasa sesuai dengan bahasa penunjang dalam pengajaran agama masing masing. Dahulu pemerintah pernah mengadakan pembahasan berkenaan dengan persoalan itu, hasilnya adalah keputusan bersama oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama Kementerian agama untuk membentuk Panitia Penasehat Agama Pengajaran Agama di lembaga pendidikan atau sekolah – sekolah negeri. Panitia tersebut meliputi, Ketua Drs. Sigit, dengan anggota diantaranya Sdr. Mawardi, Sdr. Pinandojo, dan Ki Hajar Dewantara.³⁶

Setelah melalui beberapa hal pembahasan tentang “pengajaran agama” tersebut kemudian diputuskanlah hasil supaya pembelajaran agama kepada peserta didik diberikan dengan cara menyatukan bahan – bahan dari semua golongan agama dan dibentuk menjadi satu – kesatuan sebagai “etik” atau pelajaran budi pekerti. Adapun spesifik tentang ajaran – ajaran agama dapat diputuskan atau diserahkan pada pemerintah daerah, baik karesidenan atau kabupaten. Seperti apa yang diterapkan akan pemahaman “pengajaran agama” dalam lembaga pendidikan binaan Ki Hajar Dewantara, layak dijadikan acuan untuk sekolah – sekolah di masa kini demi terciptanya akar moderasi beragama itu sendiri. Taman Siswa mengatur hal demikian sebagai berikut, *Pertama* berkaitan tentang agama, baik setiap murid dan guru diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing – masing namun dengan catatan dapat saling menghormati satu sama lain.³⁷

Poin pembelajaran yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana dalam suatu lembaga pendidikan dapat tercipta suasana yang damai, saling menghargai, dan menghormati. Peserta didik merupakan individu yang nantinya akan mendapat pengajaran sedangkan guru sebagai seorang yang memberikan transformasi ilmu kepada para peserta didiknya. Apabila budaya atau kultur yang dibangun dalam sekolah – sekolah dapat berdamai meskipun terdapat keberagaman beragama maka hal ini adalah modal awal yang sangat penting untuk keberlanjutan moderasi beragama di negara ini.³⁸ *Kedua*, agama dimasukkan sebagai pengajaran etika atau budi pekerti. Mengenai pengajaran budi pekerti, Ki Hajar Dewantara

³⁵ Warsito and Widodo, “Implementasi Nilai-Nilai Luhur Ajaran Ki Hajar Dewantara Dalam Perkuliahan Pendidikan Pancasila Untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa,” 7.

³⁶ Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, 188–89.

³⁷ Dewantara, 188.

³⁸ Dewantara, 188.

telah memberikan sedikit banyak tentang gambaran umum menyoal apa itu budi pekerti, bentuk pengajaran dalam bukti pekerti, bagaimana implementasi pengajaran budi pekerti pada tingkatan peserta didik. Banyak yang beranggapan bahwa pengajaran budi pekerti hanya dapat diberikan oleh orang dewasa dan berilmu. Namun sejatinya pengajaran budi pekerti tidak dilakukan secara terstruktur sebagaimana pengajaran disiplin ilmu lainnya.³⁹

Pada pengajaran budi pekerti media yang paling berperan adalah bagaimana spontanitas dari pamong itu sendiri. Tidak bergantung apakah terbagi dan tersusun dalam "daftar pelajaran", setiap pendidik seyogyanya mengerti dan memberikan pengajaran terkait budi pekerti baik sebagai guru sejarah, agama, sosiologi, ilmu fisika, dan lain sebagainya.⁴⁰ Permasalah muncul ketika sebagian dari pendidik beranggapan pengajaran budi pekerti diberikan dalam wujud kajian – kajian keagamaan, ceramah tentang hidup dan kejiwaan manusia. Sebagian lainnya bahkan mengira bahwa kriteria seorang pendidik haruslah orang yang suci, tanpa perbuatan buruk, berpengetahuan serta berpengalaman. Tidak semua dari anggapan ini dapat dibenarkan karena secara tidak langsung juga menghambat akan proses pengajaran kepada peserta didik utamanya pada budi pekerti.⁴¹

Spontanitas sebagai wujud awal akan proses pengajaran budi pekerti perlu dipahami, misalnya saja duduk yang rapi, berpakaian yang sopan, tidak boleh teriak – teriak karena mengganggu ketenangan, adalah bentuk spontanitas yang dapat diterima peserta didik sebagai pengajaran budi pekerti. Pada anak-anak tidak diperlukan pengarahan yang berbelit-belit dan menggunakan teori karena kapasitas mereka yang dirasa belum mampu untuk sepenuhnya berpikir. Pada remaja hingga menginjak dewasa barulah dapat menggunakan teori dan pemahaman kepada mereka karena sudah mulai berfikir dan menyaring apa yang mereka terima. Itulah yang dimaksudkan dalam pengajaran budi pekerti.⁴²

Pada daerah – daerah yang budayanya terikat akan ajaran agama, seperti menerapkan hukum – hukum Islam dalam hukum adat istiadatnya maka diperbolehkan untuk memasukkan pendidikan agamanya dalam pengajaran lembaga pendidikan, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk memaksanya.⁴³ Pada Taman Siswa hari libur yang digunakan menyesuaikan dengan agama yang dipercayainya. Ki Hajar Dewantara juga telah memberikan peringatan terkait putusan yang diadakan oleh Susunan Kongres terkait pengajaran agama bahwa memang tidak mungkin untuk mewujudkannya dalam bentuk yang

³⁹ Dewantara, 189.

⁴⁰ Feriyanto, "Tarekat Dan Moderasi Beragama," 170.

⁴¹ Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, 484.

⁴² Dewantara, 484–85.

⁴³ Suhartono Wiryanopranoto et al., *Ki Hajar Dewantara "Pemikiran Dan Perjuangannya"* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 70; Pia Nuraripah, Rahmatika Layyinah, and Fadhlul Rahman, "Konstruksi Pendidikan Moderat Melalui Pendidikan Kritis: Studi Atas Al-Talim Wa Tarbiyah Fi Al-Islam Muthahhari," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2, no. 2 (2020): 451.

utuh dan sempurna.⁴⁴ Selain itu, beliau juga memperingatkan beberapa hal yang memang penting dalam merespon keberagaman di negara ini. Diantaranya adalah sebagai berikut, *pertama*, jangan mengatakan apa yang tak mungkin disatukan. Makna yang terkandung dalam peringatan ini rasanya juga dapat menjadi pondasi akan terwujudnya moderasi beragama melalui sikap toleransi.⁴⁵

Penerapan sikap toleransi yang benar bukanlah menuruti, menerima, bahkan sampai mengikuti perbedaan yang bukan lagi masuk dalam ruang lingkup sikap toleransi, seperti mencampuradukkan ibadah spiritualistik antar agama. Hal demikian bukan hanya keluar dari ajaran agamanya masing – masing tetapi juga memicu timbulnya konflik antar umat beragama. *Kedua*, jangan mengatakan apa yang tak perlu disatukan. Oleh karenanya tidak semua keberagaman dan perbedaan dapat disatukan, tentu setiap agama memiliki batasan – batasan tertentu terutama dalam perihal akidah. Moderasi beragama yang diwujudkan bukan dengan cara yang demikian, namun lebih kepada tata cara hidup bersosial dan bernegara yang baik. *Ketiga*, menyatukan hal – hal yang substantif atau bernilai pokok saja maka ini sudah lebih dari cukup untuk menciptakan persatuan yang kokoh dan abadi.⁴⁶

Setiap individu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan serta perbedaan sikap kejiwaannya masing – masing. Dengan demikian maka muncul keragaman pandangan terhadap hidup ini mengenai aliran – aliran tentang bagaimana “baik” dan “jahat” dalam kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pembahasan Ilmu Adab diantaranya terdapat aliran *utilisme*, yakni aliran yang menempatkan kebahagiaan orang banyak sebagai tingkat kebahagiaan tertinggi dari kehidupan manusia.⁴⁷ Selanjutnya terdapat aliran *wundt*, yakni aliran sikap kejiwaan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding dengan kepentingan pribadi tiap – tiap manusia. Bukan tanpa alasan kemudian beliau menyebutkan kedua aliran tersebut dalam bab Ilmu Adab. Pengertian singkat dari “Ilmu Adab” merupakan keilmuan yang mempelajari berbagai macam persoalan kebaikan dan keburukan manusia meliputi ruang pikiran, tindak tanduknya sampai pada perbuatan yang dilakukannya kemudian. Kembali pada dua aliran yang sebelumnya telah sedikit dijabarkan maka rasanya penting untuk benar – benar dipahami dan diterapkan manusia dalam hidup bermasyarakat. *Utilisme* dengan mengarahkan agar manusia tidak mengedepankan egonya, membentuk sikap kejiwaan agar supaya tidak memikirkan kebahagiaan individu tanpa peduli dengan kebahagiaan lingkungan sekitar dirasa sangat relevan menjadi landasan berpikir dan bertindak saat banyak keberagaman di tempat tersebut.⁴⁸

Contoh saja bagaimana hidup di bangsa ini dengan keragaman umat beragamanya maka bukanlah hal yang tepat untuk mengedepankan sikap egois antar individu. Ketika telah

⁴⁴ Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, 188–90.

⁴⁵ Dewantara, 459–462.

⁴⁶ Dewantara, 463–464.

⁴⁷ Dewantara, 459.

⁴⁸ Dewantara, 461–462.

diakui keberadaan dan kedudukan setiap agama maka sebagai umat pemeluk agama seyogyanya menyadari akan kapasitas menjalankan ajaran agamanya masing – masing. Setiap agama pasti akan memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat itu dapat tercapai. Ajaran dalam setiap agama tentunya mengarahkan dan ditujukan agar tercipta suasana yang tenang dan damai baik antar pemeluk agama, maupun dengan pemeluk agama lainnya. Bagaimana konsep aliran *utilisme* kemudian dapat menjawab tantangan akan terwujudnya moderasi beragama, adalah dengan menanamkan sikap kejiwaan aliran ini pada setiap pemeluk agama.⁴⁹ Dalam artian ketika setiap individu telah memahami dan menerapkan pada kehidupan sehari – hari untuk tidak melulu mengedepankan rasa egoisnya maka akan tercipta rasa saling pengertian, memahami, dan menghargai demi satu tujuan, yakni kebahagiaan bersama.

Dengan demikian setiap individu bisa menjalankan ajaran agamanya dengan penuh rasa bahagia, tidak mudah terprovokasi saat terjadi gesekan antar agama, serta muncul sikap kedewasaan dalam umat beragama menjadi tonggak nyata untuk terwujudnya moderasi beragama yang didambakan oleh setiap manusia. Kemudian pada aliran sikap kejiwaan yang kedua, yakni *wundt* merupakan sikap mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.⁵⁰ Hal ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan aliran sebelumnya yang mengutamakan kebahagiaan masyarakat dibanding kebahagiaan individu. Dengan sikap mengutamakan kepentingan masyarakat tentu hal ini menjadi modal utama untuk terciptanya suasana yang damai dan tenang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dari dua aliran tersebut meski tidak secara spesifik Ki Hajar Dewantara menjelaskan persoalan moderasi beragama secara spesifik namun dengan poin – poin dari penjelasannya terkait pengajaran agama dalam lembaga pendidikan dan ilmu adab dapat kita tarik benang merahnya terhadap persoalan moderasi beragama di Indonesia.

Selanjutnya dalam pembahasan adat-istiadat Ki Hajar Dewantara menjelaskan sedikit pengertian umum bahwasanya adat istiadat merupakan kebiasaan – kebiasaan yang dianggap baik dan diakui kedudukannya oleh masyarakat umum di suatu daerah atau tempat tertentu. Meskipun adat istiadat bukanlah perkara hukum yang diperintahkan dan disusun oleh pemerintah, juga tidak tertulis secara sah, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa kebenaran, kekuatan, dan kekuasaannya telah melebur menjadi bagian dari hati masyarakat. Di Indonesia berturut – turut agama Hindu dan Islam memberikan pengaruh yang kuat terhadap adat – istiadat kita. Bahkan melebur dan menyertai setiap individu dalam hidup beragama dan bernegara, baik secara lahir dan batin. Tidak sama dengan pengaruh yang diberikan oleh bangsa Barat selama bertahun – tahun masa penjajahan.⁵¹

⁴⁹ Dewantara, 462.

⁵⁰ Dewantara, 462.

⁵¹ Dewantara, 463.

Pengaruh yang diberikan oleh mereka hanya berada pada lingkup kaum lapisan atas atau yang memegang jabatan tertentu serta hanya berada pada alam pikiran. Kembali pada pengaruh yang diberikan oleh agama Hindu dan Islam sehingga mampu membentuk adat – istiadat yang sebagian besarnya masih berlaku hingga saat ini, menjadi tolak ukur akan kedamaian yang mampu diwujudkan oleh para pemeluk agamanya masing – masing. Secara tidak langsung dengan perbedaan adat – istiadat tetapi mampu menerima, menghargai, dan tidak bersikap fanatismen maka moderasi beragama bukan hal yang mustahil untuk dicapai.⁵²

PEMBAHASAN

Ikhtiar untuk menjaga dan merawat tradisi salah satunya dilakukan dengan penerapan moderasi beragama sehingga tercapainya gagasan Islam yang ramah dan indah.⁵³ Dalam pandangan lain menyebutkan bahwa untuk merawat kesatuan bangsa maka harus menghilangkan kebudayaan dan tradisi yang sudah ada. Akan tetapi, muncul moderasi beragama disini bukan untuk menghilangkan, menambah, atau mengganti sesuatu yang sudah ada, namun menguatkan karakter dasar ajaran agama yang di dalamnya terkandung nilai moderat. Hal ini juga selaras tentang Islam yang berjalan di pertengahan sesuai dengan al-Quran surat al-Baqarah: 143. Dengan melihat majemuknya masyarakat Indonesia, maka moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga dan menyeimbangkan kemajemukan itu sendiri. Jika ada moderasi pasti akan ada toleransi, apabila toleransi sudah dibangun dengan baik sejak dini, maka sikap moderat akan dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat. Disitulah letak pentingnya pendidikan yang harus menanamkan sikap moderat dan mendalami toleransi. Penanaman nilai-nilai moderasi harus dibangun sejak berada di bangku sekolah, selain siswa mendapatkan materi mereka juga dituntut untuk mengimplementasikan sikap moderasi dan toleransi di sekolah. Sebagai contoh ketika dalam satu kelas terdapat siswa non-muslim dan muslim.⁵⁴ Pada saat bulan ramadhan, siswa yang muslim melakukan puasa ramadhan, maka sikap yang harus dilakukan oleh temannya yang non-muslim adalah menghargai, yaitu dengan tidak makan di depan temannya, tidak menggoda dan mengganggu lancarnya puasa temannya yang non-muslim. Hal-hal kecil seperti ini harus mulai ditanamkan sejak dini, karena itu bisa dijadikan bekal ketika mereka menghadapi massa yang lebih banyak.

Beberapa penelitian yang membahas tentang moderasi beragama di lakukan di Indonesia. Dalam penelitian yang berjudul “Moderasi Pendidikan Nasional Berbasis Metode Sorogan dalam Menghadapi Bonus Demografi” menyatakan bahwa penerapan moderasi

⁵² Dewantara, 463–464.

⁵³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019, 57.

⁵⁴ Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan”; Saifuddin, *Moderasi Beragama*.

beragama dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan metode *sorogan*, artinya peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun karakternya, diuji kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan kedisiplinan, hal ini dilakukan untuk menghadapi bonus demografi.⁵⁵ Dalam penelitian lain yang berjudul “Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA” menyatakan bahwa upaya pembaharuan pemikiran melalui rekonstruksi pendidikan agama sangat diperlukan.⁵⁶ Penilitian ini fokus pada eksistensi moderasi beragama dalam kurikulum PAI, selain itu juga membahas urgensi *redesign* kurikulum PAI dalam memerangi radikalisme yang dilakukan melalui praktik pendidikan multikultural di kalangan sekolah menengah atas. Selain itu terdapat pula penelitian yang berjudul “Eksistensi dan Implementasi Nilai Moderasi Islam pada Kurikulum Pembelajaran PAI di SDN Tunon 2 Kota Tegal” memiliki titik fokus pada pengimplementasian dan eksistensi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI di sekolah dasar dan erat kaitannya dengan kondisi pandemi, dengan mengetahui bagaimana cara pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik.⁵⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, masih belum ada penelitian yang membahas tentang moderasi beragama yang diambil langsung dari perspektif bapak pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Perspektif Ki Hajar Dewantara mengacu pada pentingnya penanaman nilai-nilai moderasi beragama sejak dulu. Penanaman tentang nilai toleransi yang harus dilakukan sebelum peserta didik menempuh perjalanan yang lebih luas lagi. Dari situ akan terlihat bagaimana pentingnya peran orang tua untuk menjadi *madrasah al-ula* bagi anaknya, menjadi pintu masuknya penerapan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Disinilah peran orang tua dibutuhkan, sebagai orang yang memberikan pengajaran, contoh, dan penerapan praktik dari apa yang telah diajarkan. Pemberian pengertian tentang keberagaman menjadi tameng paling kuat dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama sejak kecil. Orang tua tentu harus memberikan contoh terbaik saat melakukan interaksi dengan orang lain supaya anak menyontoh bagaimana perlakunya terhadap orang lain terutama yang berbeda dengannya.

Selain itu praktik keagamaan juga bisa dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sehat tanpa ada kekerasan dan pertikaian. Lalu pembelajaran yang dilakukan disekolah juga sangat berpengaruh terhadap *output* yang akan dihasilkan. Bagaimana lembaga pendidikan memberikan pelatihan terhadap guru dan bagaimana guru mempraktikkan hasil pengetahuannya terhadap murid dan bagaimana guru bersikap terhadap murid. Hal itu sangat penting dalam praktik penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Implikasinya diletakkan

⁵⁵ Muhammrah, “Moderasi Pendidikan Nasional Berbasis Metode Sorogan Dalam Menggapai Bonus Demografi.”

⁵⁶ Yunus Yunus and Arhanuddin Salim, “Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI Di SMA,” *Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2018): 181.

⁵⁷ M. Nurul Ikhsan Saleh and Ahmad Zubaidi, *EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM: Basis Nilai, Perspektif, Dan Inovasi Pengembangannya* (Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, Istana Publishing, 2020), 47.

pada pentingnya peran orang tua dalam pembentukan karakter yang bisa menjunjung tinggi nilai perbedaan kepada anak, supaya sejak kecil ia paham tentang adanya moderasi beragama yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi tentang praktik penerapan nilai-nilai moderasi beragama sesuai dengan perspektif Ki Hajar Dewantara untuk menyelaraskan kepentingan bangsa dan mempersatukan kemajemukan yang bisa dianggap sebagai pelaku utama sebuah perpecahan.

REFERENSI

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Anisah, Nur. "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara." *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2009): 33–45.
<https://doi.org/10.18326/mdr.v1i1.117-160>.
- Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, Chris Sorensen, and Asghar Razavieh. *Introduction to Research in Education*. 8th ed. Wadsworth: Cengage Learning, 2010.
- Cahyono, Muqowim, Radjasa. "Nilai Ukhwah Wathaniyah Dalam Kehidupan Ki Hajar Dewantoro." *Jurnal Al-Ghazali* 3, no. 1 (2020): 135–44.
- Dakir, Dakir. "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 02 (2019): 495–517.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa (Anggota IKAPI), 2011.
- Feriyanto. "Tarekat Dan Moderasi Beragama." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14, no. 2 (2020): 158–72.
- George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Students Need To Know*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Institut Agama Islam An Nur Lampung*, 2021.
- Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Kartikowati, Triasih. "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring," 2016.
- Khalil Nurul Islam. "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13,

- no. 1 (2020): 38–59. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379>.
- Khotimah, Husnul. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren," 2021.
- Magta M. "Pendidikan Sesuatu Yang Pendidikan Membebaskan Yang." *Pendidikan Usia Dini* 7, no. 2 (2013): 221–32.
- Marzuki, Marzuki, and Siti Khanifah. "Pendidikan Ideal Perspektif Tagore Dan Ki Hajar Dewantara Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2016): 172–81. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12740>.
- Masykur Wahid, Ali Muhtarom, Fitri Raya. *Menanam Kembali Moderasi Beragama*, 2021.
- Muharramah, Yuli Wusthol. "Moderasi Pendidikan Nasional Berbasis Metode Sorogan Dalam Menggapai Bonus Demografi." *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2003): 113–30.
- Nuraripah, Pia, Rahmatika Layyinah, and Fadhlul Rahman. "Konstruksi Pendidikan Moderat Melalui Pendidikan Kritis : Studi Atas Al-Talim Wa Tarbiyah Fi Al-Islam Muthahhari." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2, no. 2 (2020): 471–81.
- Nurhalita, Nora, and Hudaiddah Hudaiddah. "Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara Pada Abad Ke 21." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): 298–303. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.299>.
- Nurkholida, Erna. "PERSPEKTIF JAWA (Studi Pemikiran Ki Hajar Dewantara)." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2018): 393–407.
- Ramli, Ramli. "Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa Di Kota Makassar." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019): 135–62. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219>.
- Rifa'i, Andi Arif. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Kabupaten Bangka: PP's IAIN SAS Babel, 2019.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI*, 2019.
- Saleh, M. Nurul Ikhsan, and Ahmad Zubaidi. *EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM: Basis Nilai, Perspektif, Dan Inovasi Pengembangannya*. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, Istana Publishing, 2020.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sugiarta, I Made, Ida Bagus, Putu Mardana, Agus Adiarta, and I Wayan Artanayasa. "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 3 (2019): 124–36.
- Sukri, Sukri, Trisakti Handayani, and Agus Tinus. "Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Civic Hukum* 1, no. 1 (2016): 33–41.
- Susilawati, Samsul. "Muslim Moderat Merespon Arus Modernitas Dalam Bingkai

- Multikultural." *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 245–52.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48.
- Tohir, Mohammad. "Sosok Guru Profesional Yang Ideal Ala Ki Hajar Dewantara," 1922, 1–4.
- Warsito, Ronggo, and Sahid Teguh Widodo. "Implementasi Nilai-Nilai Luhur Ajaran Ki Hajar Dewantara Dalam Perkuliahan Pendidikan Pancasila Untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa." *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22448>.
- Wijiati, Muridian. "Pendidikan Multikultural Menurut Ki Hajar Dewantara Pada Anak Usia Dini." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Wiryopranoto, Suhartono, Nina Herlina, Djoko Marihandono, and Yuda B Tangkilisan. *Ki Hajar Dewantara "Pemikiran Dan Perjuangannya."* Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Yunus, Yunus, and Arhanuddin Salim. "Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI Di SMA." *Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2018): 181–94.